



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NENENG SUSILAWATI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 14138

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.885.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/126 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
3. Tanah Seluas 929 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 645.500.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
4. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER CROSS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 110.200.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 337.234.193**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 2.977.934.193

III. HUTANG

Rp. 1.882.339.983

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.095.594.210

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.